



Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKIP)

Tahun 2024

Ormas

Ormas

Ormas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Serang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2024 telah kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja , pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan amanah kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan SKPD selama tahun 2024, sebagian konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintah yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggara pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta mencapai sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”**, sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Serang dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tidak terlepas dari kerja sama semua pihak yakni masyarakat, unsur KPU, BAWASLU, ORMAS, INTELKAM, KEMENAG, FKUB Dan TNI dan Polri, unsur Kecamatan, SKPD terkait dan tentunya seluruh jajaran yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, baik itu Kepala Badan, Sekretaris, Unsur Kabid, Kasi, Kasubag, staf serta Tenaga Honorer yang telah memberikan dedikasi serta kontribusinya dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan

Serang, Januari 2025

➤ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Serang



H. EPI PRIATNA, S.Sos., M.Si

NIP.19660309 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD.....	6
BAB III AKUNTABILITAS	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB VII INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang Tahun 2024 terhadap pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, terdapat 2 (Dua) sasaran dengan predikat kinerja Amat Baik.

Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, selanjutnya SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengatur bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Laporan Kinerja disusun dan disajikan atas

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, dan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dajn RB Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP diselenggarakan secara selaras dan sesuai penyelenggaraan Sistem Akutansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2024 pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Pemerintah Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang berdasarkan Perbup Nomor 102 Tahun 20: 11 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dalam masa transisi/peralihan, namun tetap merujuk pada Peraturan Bupati Serang Nomor 102 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang yang menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok.

1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Serang.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- b. Pengoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Kepala dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi program perencanaan, evaluasi, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian;
- b. Pengaturan penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi program perencanaan, evaluasi, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi program perencanaan, evaluasi, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian;
- d. Pengawasan penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi program perencanaan, evaluasi, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan program perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan program perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan program perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan program perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (4) Sub Bagian Umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (5) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

- (6) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (7) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (8) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

- (9) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (10) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (11) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

- (12) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan nasional;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (13) Sub Bidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang penanganan konflik;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas dibidang penanganan konflik;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dibidang penanganan konflik;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas dibidang penanganan konflik;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.
- (14) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

4. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Serang

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2024, berjumlah 22 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan profil seperti dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Latar Belakang Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	Orang	1
	Golongan IV/b	Orang	1
	Golongan IV/a	Orang	3
2	Golongan III/d	Orang	7
	Golongan III/c	Orang	2
	Golongan III/b	Orang	4
	Golongan III/a	Orang	1
	Golongan IX	Orang	1
3	Golongan II/d	Orang	1
	Golongan II/c	Orang	1
4	TKS	Orang	10
Jumlah			32

Tabel 1.2
Jumlah Sarana Prasarana

No	Jenis sarana	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Roda Empat	3
2.	Kendaraan Roda Dua	2
3.	Komputer	5
4.	Printer	7
6	Laptop	15
7	AC Split	3
8	Rak Besi	5
9	Filing Cabinet Besi	3
10	Kursi Biasa/Besi	20
11	Meja 1/2 Biro	10
12	Sofa	2
13	Lemari Besi/Metal	11
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	15

5. Kinerja Pelayanan

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik.

Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, meliputi :
 1. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
 2. Pembentukan Kader Bela Negara dan Bimtek Penguatan Komitmen Kebangsaan melalui Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
 3. Pelaksanaan Sosialisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi ASN, Ormas dan Pelajar di Kabupaten Serang;
 4. Diseminasi Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Pancasila bagi ASN, Ormas dan Pelajar di Kabupaten Serang;
 5. Pengawasan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, meliputi :
 1. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (Rakor FKUB Kab. Serang);
 2. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Kab. Serang;
 3. Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Workshop P4GN Tingkat Kab. Serang;
 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan dan Perkembangan Ekonomi Daerah, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, meliputi :

1. Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka Sukses Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Bimtek Penyusunan LPJ Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
3. Peningkatan Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik, ASN dan Masyarakat di Kabupaten Serang;
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Politik di Kabupaten Serang.

d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan, meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Terpadu (Timdu) Pendaftaran, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas;
2. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Penguatan Kelembagaan Ormas;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas di Kabupaten Serang.

e. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Serang;
2. Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (Timpora) di Kab. Serang;
3. Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM) atau Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Serang;

4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Kabupaten Serang.

Masyarakat Kabupaten Serang cukup responsif dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional, disebabkan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi.

Bidang/urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kabupaten Serang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah cukup kondusif.

Tingkat capaian kinerja Bidang/urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang berdasarkan target/sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang

Untuk menyusun suatu formulasi rencana strategik yang merupakan perwujudan pandangan ideal yang hendak dicapai sangat dibutuhkan penguasaan informasi tentang masalah- masalah dalam lingkungan internal dan eksternal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang yang relevan dengan fokus partisipasi politik masyarakat, pengembangan wawasan kebangsaan dan Hak Asasi Manusia serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kehidupan masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya bergerak di bidang sektor pertanian dan perikanan, terutama masyarakat yang berada di wilayah perdesaan dengan jumlah 326 desa dan yang tersebar di 29 Kecamatan menunjukkan masih perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap kondisi sosial dan pola kehidupan masyarakat didesa sebagai akibat dari berbagai krisis sosial yang dipacu oleh kondisi perekonomian dan moneter yang belum menentu sampai saat ini.

Adapun sasaran yang ingin dicapai disini adalah untuk mencermati kekuatan dan kelemahan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang meliputi faktor peluang dan tantangan eksternal yang mempengaruhi, sehingga dapat dilakukan antisipasi menghadapi perubahan-perubahan di masa datang yang lebih bersifat inovasi dan perbaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam rangka menuju tujuan (keadaan yang diinginkan).

Dalam lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tersebut meliputi :

1. Meningkatnya dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan adanya landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama berbagai unsur antara lain : badan, dinas, Kantor, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta, dan unit unit kerja lainnya terkait untuk memperlancar tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Meningkatnya penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan kegiatan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang semakin baik.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi

Namun demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

- a Minimnya anggaran operasional yang berasal dari APBD untuk kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang belum maksimal, disebabkan baru terbentuknya Kesbangpol menjadi Badan serta adanya penetapan skala prioritas kegiatan.
- b Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang menjadi inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang.
- c Data base yang kurang lengkap.

Hal tersebut dilihat dari Jenis data-data tentang :

- Keberadaan Ormas/LSM/Orsospol Organisasi Keagamaan/yayasan.
- Kejadian-kejadian tentang upaya-upaya yang mengganggu suasana IPOLEKSOSBUD di Kabupaten Serang.
- Masih belum optimal dan perlu penertiban dalam mengelola administrasinya.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dalam waktu lima tahun kedepan diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka akan terwujud pelayanan yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan lima tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan penyelenggaraan kegiatan yang bergerak dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme, perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan status kelembagaan dari Kantor menjadi Badan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan unit perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana terhadap

penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan dan penyusunan program yang sesuai tugas pokok dan fungsi.

7. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan kegiatan yang bergerak dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adanya harapan kedepan untuk bisa maju diantaranya adalah :

1. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai ujung tombak di Kabupaten Serang.
2. Mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang efisien dan efektif sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Perencanaan kegiatan dapat menjadi arah kebijakan dan pedoman yang efektif dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Adanya proses partisipatif dan transparansi dalam penyusunan program kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
AKUNTABILITAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERANG

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Kondisi yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. oleh karena itu partisipasi semua pihak dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas daerah khususnya di Kabupaten Serang sangat diperlukan, mengingat Kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara makro terlihat secara kasat mata bahwa terdapat berbagai ancaman yang dapat berimplikasi pada lemahnya rasa persatuan dan kesatuan antar komponen bangsa yang sangat terasa dihadapi oleh bangsa ini dalam kurun waktu triwulan pertama tahun 2017.

Namun kita sebagai bangsa yang besar dengan catatan- catatan sejarah yang telah ditempuh oleh Bangsa Indonesia harus bersikap optimis dalam menghadapi tantangan- tantangan yang sedang dan akan terjadi, sehingga Bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Serang dapat meningkatkan capaian angka Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, Aspek Lembaga- Lembaga Demokrasi, Angka aspek-aspek tersebut akhirnya terangkum dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Semakin tinggi angka capaian IDI dapat menggambarkan kondisi stabilitas negara / daerah yang apabila capaian IDI dalam angka skala yang baik, dan diharapkan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mampu meningkatkan capaian angka Aspek Toleransi beragama, kesetaraan dan Kerjasama yang terangkum dalam Indikator Kerukunan Umat Beragama (KUB), sehingga Kabupaten serang khususnya dan Bangsa Indonesia dapat berakselerasi melaksanakan pembangunan dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Sehingga untuk mencapai kondisi tersebut, masih terdapat permasalahan- permasalahan yang harus diatasi, dan Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dari Tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024 sebagaimana terurai pada Bab 2. 3, telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : :

1. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Peningkatan Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak- Hak Politik, Aspek Lembaga- Lembaga Demokrasi yang terangkum dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
2. Peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Serang dalam Aspek Toleransi beragama, kesetaraan dan Kerjasama yang terangkum dalam Indikator Kerukunan Umat Beragama (KUB);
3. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara optimal melalui Peningkatan Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik, ASN dan Masyarakat di Kabupaten Serang, Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka Sukses Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta Verifikasi Pengajuan, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Bimtek Penyusunan LPJ Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Adapun jumlah Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Parpol yang Memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Serang pada Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Golkar	11 Kursi
2.	Partai Gerindra	7 Kursi
3.	Partai PKS	6 Kursi
4.	Partai Demokrat	4 Kursi
5.	Partai PAN	4 Kursi
6.	Partai PDI Perjuangan	5 Kursi
7.	Partai PKB	5 Kursi
8.	Partai PPP	3 Kursi
9.	Partai Nasdem	5 Kursi
Jumlah Total Kursi		50 Kursi

4. Pelaksanaan Pembinaan Ormas/Yayasan/Nirlaba di Kabupaten Serang melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Terpadu (Timdu) Ormas, adapun ormas yang mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan masih berlaku di Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Serang dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Ormas / Yayasan / Nirlaba yang Mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Serang Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Ormas/Yayasan/Nirlaba
1.	Tahun 2020	12
2.	Tahun 2021	6
3.	Tahun 2022	15
4.	Tahun 2023	9
5.	Tahun 2024	16

5. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial (PKS), Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (Timpora) dan Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Serang;
6. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
7. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan, penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi ASN, Ormas dan Pelajar di Kabupaten Serang dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
8. Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana kerja, dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja.

B. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih VISI

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Serang, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera,
Berkeadilan Dan Agamis”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Serang yaitu:

MAJU

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dan untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Misi pembangunan sebagai berikut:

- i. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
- ii. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional.
- iii. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.

- iv. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- v. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
- vi. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang 2021 – 2026, maka Badan Kesbangpol Kabupaten Serang memiliki kewajiban untuk mengampu misi pada nomor 6 yaitu Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara. Selanjutnya pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 disusun untuk menunjang misi 6 Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Serang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Serang.

Hal ini diwujudkan dalam sejumlah program urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sesuai dengan sasaran nomor 1 dalam misi 6 yaitu “Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara”. Dan Program-programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Dan Budaya.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mewujudkan sasaran nomor 1 dalam misi 6 dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Serang baik faktor pendukung maupun faktor penghambat sebagai berikut;

Faktor penghambat :

1. Kekosongan Pegawai dan Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi;
2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai Kesbangpol Kabupaten Serang yang belum optimal;
3. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang yang belum maksimal;
4. Adanya potensi terjadinya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
5. Disinyalir terjadinya penurunan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
6. Adanya potensi terjadinya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah;
7. Belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional sehingga kinerja pegawai belum optimal.

Faktor pendorong :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilu serentak;
2. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Serang dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 yaitu :” Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis khususnya misi ke-6 yaitu Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara, yang selaras di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan

C. Telaahan Renstra K / L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang melakukan

progam dan kegiatan telah sesuai dengan progam dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Issue – issue strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan atas urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik yang tertuang dalam Indikator Kinerja Program (IKP) Dirjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia sebagai berikut :

- i. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang idiologi, radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
- ii. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
- iii. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Issue – issue strategis yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten yang mencakup aspek- aspek diantaranya adalah :
 - a. Aspek kebebasan Sipil;
 - b. Aspek hak – hak politik;
 - c. Aspek lembaga – lembaga demokrasi.

Adapun capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebesar 72,60 % dan masuk Kategori Sedang.

2. Peningkatan Indikator Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Banten yang mencakup aspek-aspek diantaranya adalah :

- a. Aspek Toleransi;
- b. Aspek Kesetaraan;
- c. Aspek Kerjasama.

Untuk capaian Indikator Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebesar 68,9 % dan merupakan capaian terendah secara nasional.

- iv. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang idiologi, radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
- v. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
- vi. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Issue – issue strategis yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2017-2021 sebagai berikut :

3. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten yang mencakup aspek- aspek diantaranya adalah :

- a. Aspek kebebasan Sipil;
- b. Aspek hak – hak politik;
- c. Aspek lembaga – lembaga demokrasi.

Adapun capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebesar 72,60 % dan masuk Kategori Sedang.

4. Peningkatan Indikator Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Banten yang mencakup aspek-aspek diantaranya adalah :

- a. Aspek Toleransi;
- b. Aspek Kesetaraan;
- c. Aspek Kerjasama.

Untuk capaian Indikator Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebesar 68,9 % dan merupakan capaian terendah secara nasional.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari sisi telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi sasaran yang ditetapkan adalah :

Faktor penghambat :

- i. Adanya urbanisasi masyarakat dari daerah lain yang masuk ke wilayah Kabupaten Serang diakibatkan oleh berkembangnya industri;
- ii. Pengangguran dan penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal bagi masyarakat pribumi yaitu masyarakat Kabupaten Serang;
- iii. Ketimpangan sosial masyarakat di Kabupaten Serang yang berpotensi menimbulkan konflik;
- iv. Penggunaan lahan/kawasan tertentu yang belum sesuai dengan peruntukannya, sehingga menimbulkan potensi konflik;
- v. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.

Faktor pendorong :

1. Adanya dukungan program terpadu lintas sektoral
2. Pemantapan Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektoral

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan mendasar di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang memerlukan penanganan prioritas.

dari telaahan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang terhadap :

- i. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang;
- ii. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang;
- iii. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L yaitu Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sehingga dari telaahan tersebut diatas, Penentuan isu isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan target kinerja 2021 – 2026 adalah melalui :

1. Kegiatan-kegiatan yang mendukung Peningkatan Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak- Hak Politik, Aspek Lembaga- Lembaga Demokrasi yang terangkum dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
2. Peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Serang dalam Aspek Toleransi beragama, kesetaraan dan Kerjasama yang terangkum dalam Indikator Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
3. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara optimal melalui Peningkatan Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik, ASN dan Masyarakat di Kabupaten Serang, Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Daerah dalam

rangka Sukses Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta Verifikasi Pengajuan, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Bimtek Penyusunan LPJ Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

4. Pelaksanaan Pembinaan Ormas/Yayasan/Nirlaba di Kabupaten Serang melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Terpadu (Timdu) Ormas;
5. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial (PKS), Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (Timpora) dan Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Serang;
6. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

7. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan, penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi ASN, Ormas dan Pelajar di Kabupaten Serang dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
8. Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana kerja, dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. SERANG-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi Indonesia	Persentase	74
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase	88.50

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. SERANG
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2022

Jabatan	:	KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. SERANG
Tugas	:	Memimpin, Merencanakan, Mengatur, Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan serta Mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
Fungsi	:	1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik 5. Pelaksanaan tugas tambahan

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah Peningkatan Nilai Nasionalisme dan semangat Demokrasi di Masyarakat dibagi Jumlah Peningkatan Nilai Nasionalisme dan Semangat Demokrasi di Periode yang Sama di kali 100%	Indeks Demokrasi Indonesia
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Penerapan Keagamaan di Masyarakat dibagi Jumlah Penerapan Keagamaan dimasyarakat Periode yang sama dikali 100%	Indeks Kerukunan Umat Beragama

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Serang tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C,25.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatka n kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	73	73.50	73.80	74	74.30
			2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86.90	87.40	87.95	88.50	89.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Merupakan langkah yang berisikan Program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

(Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 51 Permendagri 86/2017)

Juga merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan.

ARAH KEBIJAKAN

Merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

(Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 52 Permendagri 86/2017)

Dan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Adapun Strategi dan Arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C 2.6.

Tabel T-C.26
Strategi dan Arah
Kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis"			
Misi 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan dan kampanye nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan SKPD
			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di tingkat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tahun 2021-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2021- 2026. Program dan Kinerja Program serta Kegiatan dan Kinerja Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel T.C 2.7.

BAB VII

INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik sehingga indikator kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel T-C 2.8 berikut :

TABEL T-C 2.8
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		73	73.50	73.80	74	74.30	
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama		86.90	87.40	87.95	88.50	89.00	
3	Persentase partai politik yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase konflik sosial terselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tahun 2024 sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya **good governance**. LAKIP ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap Perangkat Daerah khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2024 ini disusun. Tentunya belumlah sempurna laporan yang telah disusun, masih terdapat kelemahan di beberapa aspek sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Serang, Januari 2025

↳ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Serang



H. EPI PRIATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19660309 198603 1 005

LAMPIRAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI

TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE : 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
5	BELANJA DAERAH					
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.114.682.194,00	0,00	5.726.134.159,00	5.726.134.159,00	(388.548.035,00)
8.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	217.596.000,00	0,00	216.961.800,00	216.961.800,00	(634.200,00)
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.216.000,00	0,00	99.606.000,00	99.606.000,00	(610.000,00)
8.01.01.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.216.000,00	0,00	99.606.000,00	99.606.000,00	(610.000,00)
8.01.01.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.216.000,00	0,00	99.606.000,00	99.606.000,00	(610.000,00)
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	12.716.000,00	0,00	12.716.000,00	12.716.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.716.000,00	0,00	12.716.000,00	12.716.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.316.000,00	0,00	6.316.000,00	6.316.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.500.000,00	0,00	45.890.000,00	45.890.000,00	(610.000,00)
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.500.000,00	0,00	36.890.000,00	36.890.000,00	(610.000,00)
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	37.500.000,00	0,00	36.890.000,00	36.890.000,00	(610.000,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.01.2.01.0002.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0002.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0004.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.500.000,00	0,00	110.475.800,00	110.475.800,00	(24.200,00)
8.01.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	110.500.000,00	0,00	110.475.800,00	110.475.800,00	(24.200,00)
8.01.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	0,00	110.475.800,00	110.475.800,00	(24.200,00)
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	0,00	69.975.800,00	69.975.800,00	(24.200,00)
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.000.000,00	0,00	69.975.800,00	69.975.800,00	(24.200,00)
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000,00	0,00	59.975.800,00	59.975.800,00	(24.200,00)
8.01.01.2.01.0007.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.481.498.050,00	0,00	4.220.698.509,00	4.220.698.509,00	(260.799.541,00)
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.248.461.550,00	0,00	3.987.662.009,00	3.987.662.009,00	(260.799.541,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.248.461.550,00	0,00	3.987.662.009,00	3.987.662.009,00	(260.799.541,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.248.461.550,00	0,00	3.987.662.009,00	3.987.662.009,00	(260.799.541,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.668.827.050,00	0,00	1.620.261.209,00	1.620.261.209,00	(48.565.841,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.165.010.000,00	0,00	1.163.950.463,00	1.163.950.463,00	(1.059.537,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.158.510.000,00	0,00	1.157.543.263,00	1.157.543.263,00	(966.737,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.500.000,00	0,00	6.407.200,00	6.407.200,00	(92.800,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.775.000,00	0,00	119.787.494,00	119.787.494,00	(2.987.506,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.975.000,00	0,00	119.018.630,00	119.018.630,00	(2.956.370,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	800.000,00	0,00	768.864,00	768.864,00	(31.136,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.175.000,00	0,00	142.230.000,00	142.230.000,00	(2.945.000,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.175.000,00	0,00	142.230.000,00	142.230.000,00	(2.945.000,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.100.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	(20.000,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.100.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	(20.000,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.265.000,00	0,00	20.395.000,00	20.395.000,00	(6.870.000,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.265.000,00	0,00	20.395.000,00	20.395.000,00	(6.870.000,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.200.000,00	0,00	66.119.460,00	66.119.460,00	(6.080.540,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.750.000,00	0,00	65.684.940,00	65.684.940,00	(6.065.060,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	450.000,00	0,00	434.520,00	434.520,00	(15.480,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	10.052.500,00	0,00	9.732.295,00	9.732.295,00	(320.205,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	10.052.500,00	0,00	9.732.295,00	9.732.295,00	(320.205,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.550,00	0,00	13.384,00	13.384,00	(1.166,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.350,00	0,00	13.186,00	13.186,00	(1.164,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200,00	0,00	198,00	198,00	(2,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	111.562.500,00	0,00	89.186.875,00	89.186.875,00	(22.375.625,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	111.212.500,00	0,00	88.856.633,00	88.856.633,00	(22.355.867,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	350.000,00	0,00	330.242,00	330.242,00	(19.758,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.922.500,00	0,00	2.384.347,00	2.384.347,00	(3.538.153,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.902.500,00	0,00	2.368.969,00	2.368.969,00	(3.533.531,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.000,00	0,00	15.378,00	15.378,00	(4.622,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.750.000,00	0,00	5.381.891,00	5.381.891,00	(2.368.109,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.700.000,00	0,00	5.335.759,00	5.335.759,00	(2.364.241,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	50.000,00	0,00	46.132,00	46.132,00	(3.868,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.579.634.500,00	0,00	2.367.400.800,00	2.367.400.800,00	(212.233.700,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.485.093.500,00	0,00	1.429.210.000,00	1.429.210.000,00	(55.883.500,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.485.093.500,00	0,00	1.429.210.000,00	1.429.210.000,00	(55.883.500,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.094.541.000,00	0,00	938.190.800,00	938.190.800,00	(156.350.200,00)
8.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.094.541.000,00	0,00	938.190.800,00	938.190.800,00	(156.350.200,00)
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	226.508.500,00	0,00	226.508.500,00	226.508.500,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	226.508.500,00	0,00	226.508.500,00	226.508.500,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.508.500,00	0,00	226.508.500,00	226.508.500,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	16.508.500,00	0,00	16.508.500,00	16.508.500,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.508.500,00	0,00	16.508.500,00	16.508.500,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.480.500,00	0,00	10.480.500,00	10.480.500,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.028.000,00	0,00	6.028.000,00	6.028.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.02	Belanja Jasa	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0005.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0007.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.03.0005.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	127.350.000,00	0,00	127.350.000,00	127.350.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.568.000,00	0,00	17.568.000,00	17.568.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	47.250.000,00	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0002.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.032.000,00	0,00	8.032.000,00	8.032.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.02	Belanja Jasa	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
8.01.01.2.05.0010.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
8.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	780.553.440,00	0,00	716.831.400,00	716.831.400,00	(63.722.040,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00
8.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00
8.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00
8.01.01.2.06.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00
8.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00
8.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.007.800,00	0,00	0,00	0,00	(47.007.800,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	47.007.800,00	0,00	0,00	0,00	(47.007.800,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.007.800,00	0,00	0,00	0,00	(47.007.800,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.359.100,00	0,00	0,00	0,00	(17.359.100,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.482.600,00	0,00	0,00	0,00	(12.482.600,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.482.600,00	0,00	0,00	0,00	(12.482.600,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.876.500,00	0,00	0,00	0,00	(4.876.500,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.876.500,00	0,00	0,00	0,00	(4.876.500,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29.648.700,00	0,00	0,00	0,00	(29.648.700,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.362.700,00	0,00	0,00	0,00	(9.362.700,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	9.362.700,00	0,00	0,00	0,00	(9.362.700,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.286.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.286.000,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.286.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.286.000,00)
8.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.570.000,00	0,00	44.952.100,00	44.952.100,00	(617.900,00)
8.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.784.000,00	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00	(542.400,00)
8.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.784.000,00	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00	(542.400,00)
8.01.01.2.06.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	5.784.000,00	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00	(542.400,00)
8.01.01.2.06.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.784.000,00	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00	(542.400,00)
8.01.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.241.600,00	0,00	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00
8.01.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	542.400,00	0,00	0,00	0,00	(542.400,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	39.786.000,00	0,00	39.710.500,00	39.710.500,00	(75.500,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.786.000,00	0,00	39.710.500,00	39.710.500,00	(75.500,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.786.000,00	0,00	39.710.500,00	39.710.500,00	(75.500,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	19.627.000,00	0,00	19.581.000,00	19.581.000,00	(46.000,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.627.000,00	0,00	19.581.000,00	19.581.000,00	(46.000,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.159.000,00	0,00	20.129.500,00	20.129.500,00	(29.500,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.386.000,00	0,00	9.375.500,00	9.375.500,00	(10.500,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.454.000,00	0,00	7.438.000,00	7.438.000,00	(16.000,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.633.000,00	0,00	1.631.500,00	1.631.500,00	(1.500,00)
8.01.01.2.06.0003.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.686.000,00	0,00	1.684.500,00	1.684.500,00	(1.500,00)
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.598.800,00	0,00	80.598.200,00	80.598.200,00	(600,00)
8.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	80.598.800,00	0,00	80.598.200,00	80.598.200,00	(600,00)
8.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.598.800,00	0,00	80.598.200,00	80.598.200,00	(600,00)
8.01.01.2.06.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	80.598.800,00	0,00	80.598.200,00	80.598.200,00	(600,00)
8.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.598.800,00	0,00	80.598.200,00	80.598.200,00	(600,00)
8.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.598.800,00	0,00	80.598.200,00	80.598.200,00	(600,00)
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.559.740,00	0,00	45.559.000,00	45.559.000,00	(740,00)
8.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	45.559.740,00	0,00	45.559.000,00	45.559.000,00	(740,00)
8.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.559.740,00	0,00	45.559.000,00	45.559.000,00	(740,00)
8.01.01.2.06.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	45.559.740,00	0,00	45.559.000,00	45.559.000,00	(740,00)
8.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.559.740,00	0,00	45.559.000,00	45.559.000,00	(740,00)
8.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.559.740,00	0,00	45.559.000,00	45.559.000,00	(740,00)
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)
8.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)
8.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)
8.01.01.2.06.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)
8.01.01.2.06.0006.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)
8.01.01.2.06.0006.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	3.600.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.295.600,00	0,00	13.800.800,00	13.800.800,00	(494.800,00)
8.01.01.2.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	14.295.600,00	0,00	13.800.800,00	13.800.800,00	(494.800,00)
8.01.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.295.600,00	0,00	13.800.800,00	13.800.800,00	(494.800,00)
8.01.01.2.06.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	14.295.600,00	0,00	13.800.800,00	13.800.800,00	(494.800,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.295.600,00	0,00	13.800.800,00	13.800.800,00	(494.800,00)
8.01.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.295.600,00	0,00	13.800.800,00	13.800.800,00	(494.800,00)
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.109.000,00	0,00	340.108.800,00	340.108.800,00	(200,00)
8.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	340.109.000,00	0,00	340.108.800,00	340.108.800,00	(200,00)
8.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.109.000,00	0,00	340.108.800,00	340.108.800,00	(200,00)
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.01	Belanja Barang	8.609.000,00	0,00	8.609.000,00	8.609.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.609.000,00	0,00	8.609.000,00	8.609.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.609.000,00	0,00	8.609.000,00	8.609.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	330.000.000,00	0,00	329.999.800,00	329.999.800,00	(200,00)
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	330.000.000,00	0,00	329.999.800,00	329.999.800,00	(200,00)
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216.000.000,00	0,00	215.999.800,00	215.999.800,00	(200,00)
8.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)
8.01.01.2.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)
8.01.01.2.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)
8.01.01.2.06.0011.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)
8.01.01.2.06.0011.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)
8.01.01.2.06.0011.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	200.000.000,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)
8.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	325.315.504,00	0,00	325.204.390,00	325.204.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.315.504,00	0,00	325.204.390,00	325.204.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	325.315.504,00	0,00	325.204.390,00	325.204.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.315.504,00	0,00	325.204.390,00	325.204.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	305.635.504,00	0,00	305.524.390,00	305.524.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	279.840.000,00	0,00	279.840.000,00	279.840.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	191.700.000,00	0,00	191.700.000,00	191.700.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55.380.000,00	0,00	55.380.000,00	55.380.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	32.760.000,00	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	25.795.504,00	0,00	25.684.390,00	25.684.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.689.504,00	0,00	23.578.390,00	23.578.390,00	(111.114,00)
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	936.000,00	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
8.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	177.389.200,00	0,00	114.108.060,00	114.108.060,00	(63.281.140,00)
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.500.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.500.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.500.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.500.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.500.000,00)
8.01.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.500.000,00)
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.680.000,00	0,00	86.011.560,00	86.011.560,00	(48.668.440,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	134.680.000,00	0,00	86.011.560,00	86.011.560,00	(48.668.440,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.680.000,00	0,00	86.011.560,00	86.011.560,00	(48.668.440,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.600.000,00	0,00	4.932.000,00	4.932.000,00	(9.668.000,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	0,00	4.932.000,00	4.932.000,00	(9.668.000,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.600.000,00	0,00	4.932.000,00	4.932.000,00	(9.668.000,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	120.080.000,00	0,00	81.079.560,00	81.079.560,00	(39.000.440,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.080.000,00	0,00	81.079.560,00	81.079.560,00	(39.000.440,00)
8.01.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	120.080.000,00	0,00	81.079.560,00	81.079.560,00	(39.000.440,00)
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.209.200,00	0,00	28.096.500,00	28.096.500,00	(112.700,00)
8.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	28.209.200,00	0,00	28.096.500,00	28.096.500,00	(112.700,00)
8.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.209.200,00	0,00	28.096.500,00	28.096.500,00	(112.700,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	9.752.000,00	0,00	9.752.000,00	9.752.000,00	0,00
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.752.000,00	0,00	9.752.000,00	9.752.000,00	0,00
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.752.000,00	0,00	9.752.000,00	9.752.000,00	0,00
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.457.200,00	0,00	18.344.500,00	18.344.500,00	(112.700,00)
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.750.000,00	0,00	4.644.500,00	4.644.500,00	(105.500,00)
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	0,00	1.724.500,00	1.724.500,00	(105.500,00)
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.707.200,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	(7.200,00)
8.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.707.200,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	(7.200,00)
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.400.000.000,00	0,00	1.396.264.000,00	1.396.264.000,00	(3.736.000,00)
8.01.02.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.400.000.000,00	0,00	1.396.264.000,00	1.396.264.000,00	(3.736.000,00)
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)
8.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)
8.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	14.800.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(50.000,00)
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.800.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(50.000,00)
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.800.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	(50.000,00)
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0003.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	0,00	99.250.000,00	99.250.000,00	(750.000,00)
8.01.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	99.250.000,00	99.250.000,00	(750.000,00)
8.01.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	99.250.000,00	99.250.000,00	(750.000,00)
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	24.450.000,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	(750.000,00)
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.450.000,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	(750.000,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	690.000,00	0,00	0,00	0,00	(690.000,00)
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.960.000,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	(60.000,00)
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.150.000,00	0,00	46.150.000,00	46.150.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.150.000,00	0,00	46.150.000,00	46.150.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0004.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.200.000.000,00	0,00	1.197.064.000,00	1.197.064.000,00	(2.936.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.183.650.000,00	0,00	1.180.714.000,00	1.180.714.000,00	(2.936.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.650.000,00	0,00	1.180.714.000,00	1.180.714.000,00	(2.936.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	423.000.000,00	0,00	420.614.000,00	420.614.000,00	(2.386.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	423.000.000,00	0,00	420.614.000,00	420.614.000,00	(2.386.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.490.000,00	0,00	8.454.000,00	8.454.000,00	(36.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.560.000,00	0,00	122.560.000,00	122.560.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	291.950.000,00	0,00	289.600.000,00	289.600.000,00	(2.350.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02	Belanja Jasa	760.650.000,00	0,00	760.100.000,00	760.100.000,00	(550.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	184.650.000,00	0,00	184.100.000,00	184.100.000,00	(550.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	101.400.000,00	0,00	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	33.000.000,00	0,00	32.450.000,00	32.450.000,00	(550.000,00)
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	338.000.000,00	0,00	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	338.000.000,00	0,00	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.2	BELANJA MODAL	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57.256.630.200,00	0,00	56.998.969.400,00	56.998.969.400,00	(257.660.800,00)
8.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	57.256.630.200,00	0,00	56.998.969.400,00	56.998.969.400,00	(257.660.800,00)
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.645.081.000,00	0,00	2.641.131.000,00	2.641.131.000,00	(3.950.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.645.081.000,00	0,00	2.641.131.000,00	2.641.131.000,00	(3.950.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.590.000,00	0,00	96.640.000,00	96.640.000,00	(3.950.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	13.310.000,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	(3.200.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.310.000,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	(3.200.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	(3.200.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.780.000,00	0,00	22.030.000,00	22.030.000,00	(750.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.780.000,00	0,00	22.030.000,00	22.030.000,00	(750.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.780.000,00	0,00	22.030.000,00	22.030.000,00	(750.000,00)
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.03.2.01.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.05	Belanja Hibah	2.544.491.000,00	0,00	2.544.491.000,00	2.544.491.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.544.491.000,00	0,00	2.544.491.000,00	2.544.491.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.544.491.000,00	0,00	2.544.491.000,00	2.544.491.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0003.5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.544.491.000,00	0,00	2.544.491.000,00	2.544.491.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	51.730.930.000,00	0,00	51.679.263.000,00	51.679.263.000,00	(51.667.000,00)
8.01.03.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	51.730.930.000,00	0,00	51.679.263.000,00	51.679.263.000,00	(51.667.000,00)
8.01.03.2.01.0004.5.1.05	Belanja Hibah	51.730.930.000,00	0,00	51.679.263.000,00	51.679.263.000,00	(51.667.000,00)
8.01.03.2.01.0004.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.730.930.000,00	0,00	51.679.263.000,00	51.679.263.000,00	(51.667.000,00)
8.01.03.2.01.0004.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	51.730.930.000,00	0,00	51.679.263.000,00	51.679.263.000,00	(51.667.000,00)
8.01.03.2.01.0004.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	51.730.930.000,00	0,00	51.679.263.000,00	51.679.263.000,00	(51.667.000,00)
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.880.619.200,00	0,00	2.678.575.400,00	2.678.575.400,00	(202.043.800,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.774.558.500,00	0,00	2.572.796.400,00	2.572.796.400,00	(201.762.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.558.500,00	0,00	2.572.796.400,00	2.572.796.400,00	(201.762.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	484.941.500,00	0,00	401.141.400,00	401.141.400,00	(83.800.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	484.941.500,00	0,00	401.141.400,00	401.141.400,00	(83.800.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.355.500,00	0,00	13.158.400,00	13.158.400,00	(49.197.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	176.300.000,00	0,00	175.975.000,00	175.975.000,00	(325.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.726.000,00	0,00	16.480.000,00	16.480.000,00	(8.246.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.560.000,00	0,00	32.528.000,00	32.528.000,00	(26.032.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.017.617.000,00	0,00	1.900.005.000,00	1.900.005.000,00	(117.612.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	295.290.000,00	0,00	281.940.000,00	281.940.000,00	(13.350.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	138.000.000,00	0,00	136.650.000,00	136.650.000,00	(1.350.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.040.000,00	0,00	55.290.000,00	55.290.000,00	(750.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.750.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	612.927.000,00	0,00	612.765.000,00	612.765.000,00	(162.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	272.412.000,00	0,00	272.340.000,00	272.340.000,00	(72.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	340.515.000,00	0,00	340.425.000,00	340.425.000,00	(90.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	222.000.000,00	0,00	214.500.000,00	214.500.000,00	(7.500.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	210.000.000,00	0,00	208.500.000,00	208.500.000,00	(1.500.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	727.400.000,00	0,00	630.800.000,00	630.800.000,00	(96.600.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	727.400.000,00	0,00	630.800.000,00	630.800.000,00	(96.600.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	272.000.000,00	0,00	271.650.000,00	271.650.000,00	(350.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	272.000.000,00	0,00	271.650.000,00	271.650.000,00	(350.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	122.000.000,00	0,00	121.650.000,00	121.650.000,00	(350.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2	BELANJA MODAL	106.060.700,00	0,00	105.779.000,00	105.779.000,00	(281.700,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.060.700,00	0,00	105.779.000,00	105.779.000,00	(281.700,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.214.600,00	0,00	25.164.000,00	25.164.000,00	(50.600,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.530.600,00	0,00	8.480.000,00	8.480.000,00	(50.600,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.03.2.01.0005.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.530.600,00	0,00	8.480.000,00	8.480.000,00	(50.600,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.684.000,00	0,00	16.684.000,00	16.684.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.684.000,00	0,00	16.684.000,00	16.684.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.044.100,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	(144.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	14.044.100,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	(144.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	14.044.100,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	(144.100,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	66.802.000,00	0,00	66.715.000,00	66.715.000,00	(87.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.040.000,00	0,00	60.040.000,00	60.040.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.040.000,00	0,00	60.040.000,00	60.040.000,00	0,00
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.762.000,00	0,00	6.675.000,00	6.675.000,00	(87.000,00)
8.01.03.2.01.0005.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.762.000,00	0,00	6.675.000,00	6.675.000,00	(87.000,00)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	359.213.600,00	0,00	304.251.700,00	304.251.700,00	(54.961.900,00)
8.01.04.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	359.213.600,00	0,00	304.251.700,00	304.251.700,00	(54.961.900,00)
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	77.091.200,00	0,00	77.089.100,00	77.089.100,00	(2.100,00)
8.01.04.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	77.091.200,00	0,00	77.089.100,00	77.089.100,00	(2.100,00)
8.01.04.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.091.200,00	0,00	77.089.100,00	77.089.100,00	(2.100,00)
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	9.191.200,00	0,00	9.189.100,00	9.189.100,00	(2.100,00)
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.191.200,00	0,00	9.189.100,00	9.189.100,00	(2.100,00)
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.326.200,00	0,00	1.326.200,00	1.326.200,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	719.000,00	0,00	716.900,00	716.900,00	(2.100,00)
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0003.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	252.122.400,00	0,00	197.162.600,00	197.162.600,00	(54.959.800,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	252.122.400,00	0,00	197.162.600,00	197.162.600,00	(54.959.800,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.122.400,00	0,00	197.162.600,00	197.162.600,00	(54.959.800,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	28.922.400,00	0,00	11.362.600,00	11.362.600,00	(17.559.800,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.922.400,00	0,00	11.362.600,00	11.362.600,00	(17.559.800,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.096.800,00	0,00	189.600,00	189.600,00	(1.907.200,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.884.600,00	0,00	3.568.000,00	3.568.000,00	(1.316.600,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.287.000,00	0,00	7.287.000,00	7.287.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.336.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.336.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	133.200.000,00	0,00	95.800.000,00	95.800.000,00	(37.400.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.200.000,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	(27.400.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.600.000,00	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	(7.900.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(19.500.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.04.2.01.0004.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0004.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0005.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0005.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.04.2.01.0005.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	585.000.000,00	0,00	584.138.100,00	584.138.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	585.000.000,00	0,00	584.138.100,00	584.138.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0003.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0003.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0003.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0003.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	385.000.000,00	0,00	384.138.100,00	384.138.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	385.000.000,00	0,00	384.138.100,00	384.138.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	0,00	384.138.100,00	384.138.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	151.600.000,00	0,00	150.738.100,00	150.738.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	151.600.000,00	0,00	150.738.100,00	150.738.100,00	(861.900,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.340.000,00	0,00	21.015.600,00	21.015.600,00	(324.400,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.710.000,00	0,00	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.850.000,00	0,00	29.662.500,00	29.662.500,00	(187.500,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KUR)
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	91.700.000,00	0,00	91.350.000,00	91.350.000,00	(350.000,00)
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	219.000.000,00	0,00	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	219.000.000,00	0,00	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00
8.01.05.2.01.0004.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.335.000.000,00	0,00	1.248.884.900,00	1.248.884.900,00	(86.115.100,00)
8.01.06.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.335.000.000,00	0,00	1.248.884.900,00	1.248.884.900,00	(86.115.100,00)
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	198.905.200,00	0,00	182.427.600,00	182.427.600,00	(16.477.600,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	198.905.200,00	0,00	182.427.600,00	182.427.600,00	(16.477.600,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.905.200,00	0,00	182.427.600,00	182.427.600,00	(16.477.600,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	23.155.200,00	0,00	13.427.600,00	13.427.600,00	(9.727.600,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.155.200,00	0,00	13.427.600,00	13.427.600,00	(9.727.600,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.955.200,00	0,00	627.600,00	627.600,00	(3.327.600,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	(6.400.000,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.750.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	(6.750.000,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.750.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	(6.750.000,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.750.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	(6.750.000,00)
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0002.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.06.2.01.0002.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	186.094.800,00	0,00	155.567.600,00	155.567.600,00	(30.527.200,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	186.094.800,00	0,00	155.567.600,00	155.567.600,00	(30.527.200,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.094.800,00	0,00	155.567.600,00	155.567.600,00	(30.527.200,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	26.594.800,00	0,00	14.067.600,00	14.067.600,00	(12.527.200,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.594.800,00	0,00	14.067.600,00	14.067.600,00	(12.527.200,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.194.800,00	0,00	627.600,00	627.600,00	(3.567.200,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	(8.960.000,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	45.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	(18.000.000,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	(18.000.000,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	(18.000.000,00)
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00	114.500.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00	114.500.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0003.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000,00	0,00	130.177.600,00	130.177.600,00	(19.822.400,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	0,00	130.177.600,00	130.177.600,00	(19.822.400,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	130.177.600,00	130.177.600,00	(19.822.400,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	23.500.000,00	0,00	13.427.600,00	13.427.600,00	(10.072.400,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.500.000,00	0,00	13.427.600,00	13.427.600,00	(10.072.400,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.300.000,00	0,00	627.600,00	627.600,00	(3.672.400,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	(6.400.000,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.500.000,00	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00	(9.750.000,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	58.500.000,00	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00	(9.750.000,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00	(9.750.000,00)
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8.01.06.2.01.0004.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0004.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	0,00	780.712.100,00	780.712.100,00	(19.287.900,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	0,00	780.712.100,00	780.712.100,00	(19.287.900,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	0,00	780.712.100,00	780.712.100,00	(19.287.900,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	107.000.000,00	0,00	87.712.100,00	87.712.100,00	(19.287.900,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.000.000,00	0,00	87.712.100,00	87.712.100,00	(19.287.900,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.240.000,00	0,00	3.442.100,00	3.442.100,00	(1.797.900,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.760.000,00	0,00	84.270.000,00	84.270.000,00	(17.490.000,00)
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0006.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	67.050.525.994,00	0,00	66.258.642.259,00	66.258.642.259,00	(791.883.735,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.050.525.994,00)	0,00	(66.258.642.259,00)	(66.258.642.259,00)	791.883.735,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(67.050.525.994,00)	0,00	(66.258.642.259,00)	(66.258.642.259,00)	791.883.735,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

Visi

Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis

Misi

No	Misi
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara

Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	IK
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi indonesia	Persentase	Ya
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase	Ya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	1. Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan		
2	2. Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal		
3	3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		
4	4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah,		
5	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdayaalam		
6	6. Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas		
7	7. Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

8	8. Meningkatnya investasi daerah		
9	9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah		
10	10. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja		
11	11. Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa		
12	12. Meningkatnya ketahanan pangan		
13	13. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk		
14	14. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
141	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi Indonesia	Persentase
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

1411	Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	Presentase Pelayanan unit Kerja Internal yang terpenuhi dengan baik	Persentase
1412	Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	Presentase Pelayanan unit Kerja Internal yang terpenuhi dengan baik	Persentase
1413	PENINGKATAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%
14131	PENINGKATAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%
14132	PENINGKATAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%
1414	PENINGKATAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%
14141	PENINGKATAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%
14142	PENINGKATAN PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG	%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

	KARAKTER KEBANGSAAN	IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
1415	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA TERKAIT NARKOBA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	%
14151	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	%
14152	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	%
1416	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA TERKAIT NARKOBA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	%
14161	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN	%
14162	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINA TERKAIT	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA	%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

	KEPERCAYAAN	DAN KEPERCAYAAN	
1417	TINGKAT PELAKSANAAN FASILITAS PARTAI POLITIK	PERSENTASE PARTAI POLITIK YG DIFASILITASI	%
14171	TINGKAT PELAKSANAAN FASILITASI PARTAI POLITIK	PERSENTASE PARTAI POLITIK YANG DIFASILITASI	%
14172	TINGKAT PELAKSANAAN FASILITASI PARTAI POLITIK	PERSENTASE PARTAI POLITIK YANG DIFASILITASI	%
1418	TINGKAT PELAKSANAAN FASILITAS PARTAI POLITIK	PERSENTASE PARTAI POLITIK YG DIFASILITASI	%
14181	TINGKAT PELAKSANAAN FASILITASI PARTAI POLITIK	PERSENTASE PARTAI POLITIK YANG DIFASILITASI	%
14182	TINGKAT PELAKSANAAN FASILITASI PARTAI POLITIK	PERSENTASE PARTAI POLITIK YANG DIFASILITASI	%
1419	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBINA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%
14191	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

14192	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%
14110	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBINA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%
141101	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%
141102	TINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%
14111	TINGKAT PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KONFLIK SOSIAL TERSELESAIKAN	%
141111	TINGKAT PELAKSANAAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASI KONFLIK SOSIAL TERSELESAIKAN	%
141112	TINGKAT PELAKSANAAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASI KONFLIK SOSIAL TERSELESAIKAN	%
14112	TINGKAT PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KONFLIK SOSIAL TERSELESAIKAN	%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2024

141121	TINGKAT PELAKSANAAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASI KONFLIK SOSIAL TERSELESAIKAN	%
141122	TINGKAT PELAKSANAAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASI KONFLIK SOSIAL TERSELESAIKAN	%
14113	TINGKAT PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL	PERESENTASE KEWASPADAAN NASIONAL	%
141131	TINGKAT PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL	PERSENTASE KEWASPADAAN NASIONAL	%
141132	TINGKAT PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL	PERSENTASE KEWASPADAAN NASIONAL	%
14114	TINGKAT PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL	PERESENTASE KEWASPADAAN NASIONAL	%
141141	TINGKAT PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL	PERSENTASE KEWASPADAAN NASIONAL	%
141142	TINGKAT PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL	PERSENTASE KEWASPADAAN NASIONAL	%
15	15. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		

16	16. Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	
17	17. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	
18	18. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	
19	19. Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	
20	20. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	
21	21. Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	

RENCANA STRATEGIS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis

Misi

No	Misi
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara

Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	IKU
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi indonesia	Persentase	Ya
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase	Ya

Target Kinerja 5 Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Lima Tahunan				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi indonesia	Persentase	73	73.50	73.80	74	74.30
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase	86.90	87.40	87.95	88.50	89

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Instansi** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. **Visi** : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis
3. **Misi** : 1. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.
4. **Tujuan** : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Indeks Demokrasi indonesia	Jumlah Peningkatan Nilai Nasionalisme dan semangat Demokrasi di Masyarakat dibagi Jumlah Peningkatan Nilai Nasionalisme dan Semangat Demokrasi di Periode yang Sama di kali 100%	Indeks Demokrasi Indonesia	Kepala Daerah
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Penerapan Keagamaan di Masyarakat dibagi Jumlah Penerapan Keagamaan dimasyarakat Periode yang sama dikali 100%	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kepala Daerah